

## ABSTRAK

Penataan ruang untuk pedagang kaki lima (PKL) menjadi salah satu tugas Pemerintah yang memerlukan perhatian serius karena peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas. Pedagang kaki lima merupakan sektor informal sebagai tempat pencaharian sebagian masyarakat yang tidak dapat memasuki sektor formal. Di satu sisi, keberadaannya perlu dilindungi dan dipertahankan karena menyangkut kesejahteraan hidup masyarakat kecil, namun di sisi lain keberadaannya tersebut perlu ditata dan ditertibkan agar dalam pelaksanaannya tidak mengganggu ketentraman umum.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa studi dokumen (bahan pustaka), pengamatan (observasi), dan wawancara. Di samping itu menggunakan sumber data primer dan sekunder berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan serta pengamatan di lapangan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian diketahui, yaitu 1). Kebijakan Penataan, Pemberdayaan dan Penertiban PKL dapat mewujudkan tertib tata ruang. 2). Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Jepara ditempuh melalui pendataan dan pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, serta peremajaan PKL. Berdasarkan rencana pola ruang Kabupaten Jepara, penetapan lokasi PKL menurut Keputusan Bupati Jepara No. 163 Tahun 2010 tentang Lokasi Perdagangan Untuk PKL adalah sudah sesuai dengan RTRW yaitu berada di kawasan budidaya pemukiman. Adapun kebijakan pemberdayaan PKL di Kabupaten Jepara ditempuh melalui penyuluhan, pelatihan dan bimbingan sosial, peningkatan kemampuan berwirausaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana perdagangan, melakukan pengembangan jaringan dan promosi serta kemitraan dengan dunia usaha. Sedangkan kebijakan Penertiban PKL dilakukan melalui Satpol PP dengan melaksanakan penertiban PKL secara rutin setiap bulan. Kebijakan penataan, pemberdayaan dan penertiban sudah dilakukan, namun sampai sekarang belum bisa mewujudkan tertib tata ruang secara optimal dikarenakan ada beberapa masalah yang harus dihadapi terkait dengan PKL yaitu rendahnya kesadaran hukum PKL, PKL sering menolak ditertibkan atau direlokasi ke tempat lain yang lebih representatif, PKL cenderung mengabaikan kebersihan tempat sajian, makanan dan kebersihan lingkungan, lemahnya pengawasan, kembalinya PKL yang sudah direlokasi ke tempat semula yang ditertibkan, masalah ekonomi dan sosial. 3). Adapun solusi-solusi yang dilakukan Pemkab Jepara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diantaranya yaitu melakukan percepatan penetapan Raperda, melakukan penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi terhadap PKL, menyediakan tempat relokasi yang representatif, pembinaan dan sosialisasi pentingnya berperilaku hidup sehat, meningkatkan pengawasan bertingkat, dan memberikan pelatihan dan fasilitasi akses permodalan bagi PKL.

Kata kunci : Tata Ruang, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima.

## ***ABSTRACT***

Spatial planning for street vendors becomes one of the tasks of government that needs serious attention because the increase of the number of street vendors in a region have impacts on aesthetics, cleanliness, and functionality means in urban areas and also disruption of urban areas. Street Vendor is an informal sector as a place to earn a living for some people who are not able to enter the formal sector. On the one hand, its existence should be protected and preserved as it concerns the welfare of small communities. But, on the other hand, its existence needs to be arranged and disciplined so that its activities do not disturb public tranquility.

The method used in this study is a socio-judicial approach, with the type of research is qualitative descriptive, the method of data collection in the form of library research and documentation, observation and interviews. In addition, the use of primary and secondary data sources in the form of legal materials. Legal materials obtained from literature and field observations were then analyzed using qualitative descriptive methods.

Based on the findings in the study are known, namely (1) Policies of Planning, Empowerment and Controlling for street vendors can realize an orderly city planning (2) Planning Policies for street vendors in Jepara Regency are done by collecting data and registration of street vendors, determining location for street vendors, relocation for street vendors and renovation of tools and means of street vendors. According to the spatial planning for Jepara Regency, determining location for street vendors in accordance with the Jepara Regent Decree No.163 2010 is in accordance with the regional spatial planning, namely di the area of farming settlements. Community Empowerment Planning for street vendors are done by providing counseling, training and social guidance, increasing the entrepreneurial skills, facilitating capital access, facilitating trade facilities, developing channels and promotion, and also doing partnership with the business world. Controlling policies for street vendors are done by Satpol PP realized with the routine controlling activity every month. Policies of Planning, Empowerment and Controlling for street vendors have been done but the results have not been optimal because there are some problems related to the street vendors, namely low awareness of the law of street vendors, some street vendors often refuse to be disciplined or refuse to be relocated to other representative places, street vendors often ignore the cleanliness either the foods or the environment, the weakness of controlling, economy and social problems. (3)Some solutions are done by government to overcome the above mentioned problems, namely accelerating the establishment of draft of arrangement street vendors, providing counseling, training and social guidance, providing representative location for street vendors, counseling about healthy life, increasing terraced supervision, and facilitating capital access for street vendors.

Key words : Spatial Planning, Local Regulations, Street Vendors.